RANCANGAN AKHIR RENSTRA

2021-2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SITUBONDO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat tersusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan

Penyusunan Renstra ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2016-2021, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Bupati Kepala Daerah.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Situbondo ini merupakan manifestasi dari semangat segenap aparaturnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Akhirnya pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang berperan serta dalam pemnyusunan Renstra ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

BAB I PENDAHULUAN 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD 8

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD 21

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 32

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 55

BAB VIII PENUTUP 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Sebagai wujud pengembangan dari visi Kepala Daerah menjadi pandangan dalam organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku OPD yaitu “Mewujudkan Masyarakat Situbondo berahlak, Sejahtera, Adil, dan Berdaya”.

Dalam roda pemerintahan Renstra memiliki fungsi sebagai:

a. sebagai alat dalam memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang;
b. digunakan untuk mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai;
c. sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai;
d. sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
e. menjadi alat/ media untuk berkoordinasi dengan pihak lain serta mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan maka proses penyusunan untukmenghasilkan renstra yang berkualitas maka beberapa tahapan yang harus di lalui adalah:

1. Tahap Persiapan. Tahap ini merupakan langkah awal dengan melakukan pembentukan tim penyusunan Renstra OPD dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Rentra. Tim penyusunan Renstra OPD bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD dengan Keputusan kepala OPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing OPD dan diketuai oleh orang yang bertanggungn jawab atas perencanaan di OPD yang bersangkutan.
2. Tahap Perumusan / Penyusunan merupakan pengolahan data dan informasi Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.
3. Tahap Analisis gambaran pelayanan OPD terdiri dari beberapa tahapan yang tergabung didalamnya, tahapan tersebut antara lain :

- Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD.
- Analisis pengelolaan pendanaan OPD untuk mengidentifikasikan potnsi dan permasalahan khusus pda spek pendanaan pelayanan OPD.

4. Langkah selanjutnya adalah melakukan review renstra K/L dan renstra OPD Provinsi yang mencakup:
   - Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L.
   - Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
   - Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten/Kota.
   - Program prioritas OPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
5. Kemudian berlanjut pada Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup:
   - Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang.
   - Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
6. Perumusan Isu- isu Strategis
7. Perumusan visi dan misi
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD
10. Tahap Verifikasi
11. Tahap Penetapan

Keterlibatan Rentra Bakesbangpol Kabupaten Situbondo dengan RPJM Daerah Kabupaten Situbondo. Renstra Bakesbangpol Kabupaten Situbondo berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Bakesbangpol Kabupaten Situbondo sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah.Renstra Bakesbangpol Kabupaten Situbondo memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dan Badan Kesatun Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Renstra Bakesbangpol Kabupaten Situbondo digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Bakesbangpol Kabupaten Situbondo yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pembentukannya di dasarkan atas:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dana Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Situbondo.
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Pembuatan Renstra dimaksudkan untuk memberikan arah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
2. Tujuan

   Renstra sendiri merupakan gambaran dari tujuan yang ingin dicapai oleh OPD yaitu :

- Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
- Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA PD

- Daftar Isi
- BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
  - 2.2 Sumber Daya PD
  - 2.3 Kinerja Pelayanan PD
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
  - 3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - 6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Pemerintahan di Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2014 pasal 3. Dalam menjalankan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki struktur organisasi yang merupakan gambaran dari proses kinerja badan yang termasuk dalam satuan kerja pemerintah daerah.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan bidang Kesatuan Bangsa, Politik sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2014:

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagai Bagian dari Penyelengara pemerintahan di Indonesia Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. penyusunan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
d. pembinaan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama;
e. pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan LSM asing;
f. pelaksanaan koordinasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
g. pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
h. pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
i. perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
l. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki struktur sebagai berikut : Pimpinan adalah Kepala Badan yang membawahi satu Sekretaris dan Tiga Kepala Bidang (Bidang Integrasi Bangsa, Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Bidang Kewaspadaan) struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digambarkan sebagai diagram berikut :

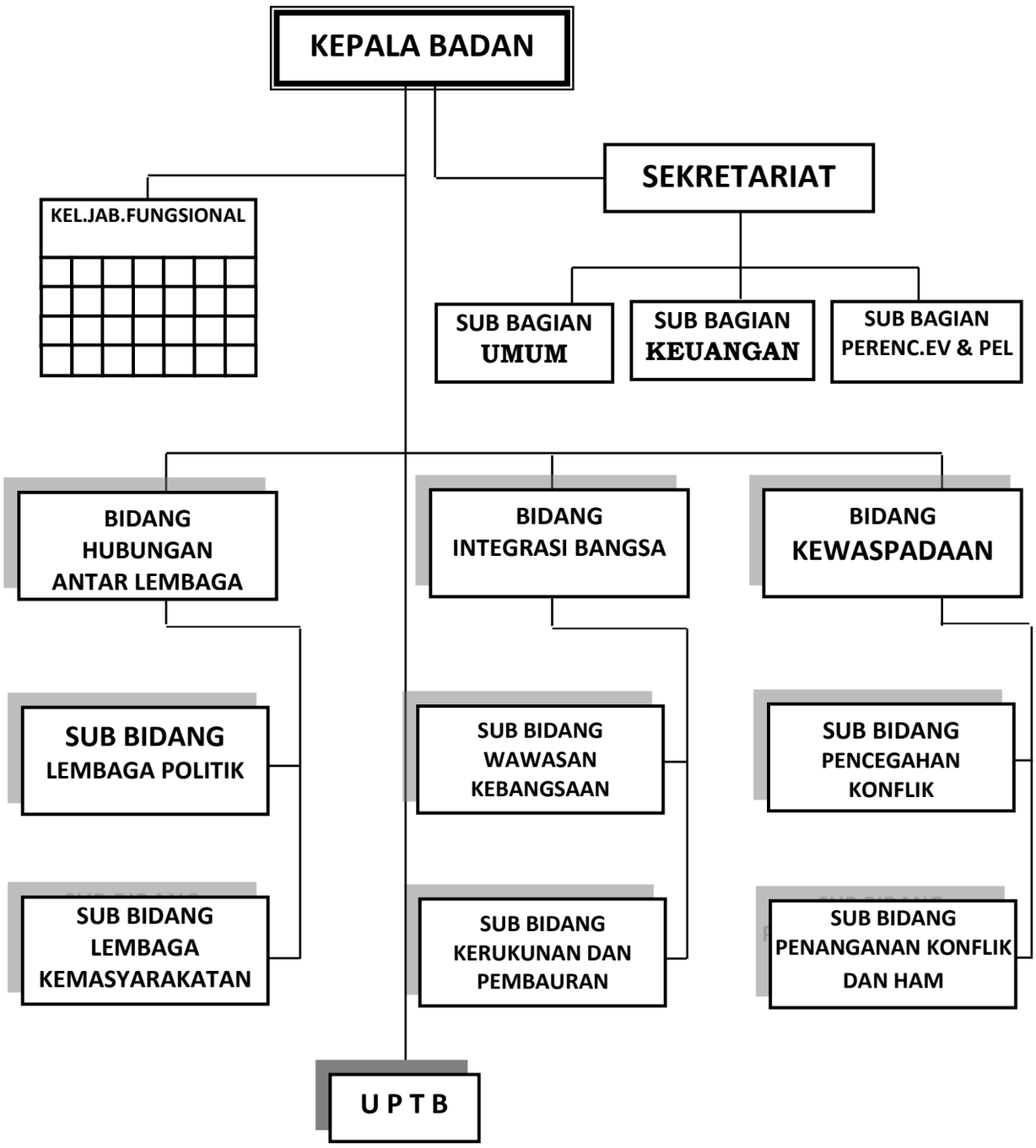

Diagram 1.Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Keterangan:

1. **Sekretaris**

   Memiliki kewenangan membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

   a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   c. pengkoordinasian penyusunan program, anggaran, peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
   d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
   e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
   f. pelaksanaan urusan keuangan;
   g. pelaksanaan urusan umum;
   h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
   i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaaan;

2. **Bidang Hubungan Antar Lembaga**:

   Membawahi Sub Bidang Lembaga Politik dan Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Hubungan Antar Lembaga. Dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :

   a. Melakukan penyusunan konsep program Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
   b. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
   c. Mengadakan penyelenggaraan program dan pelaksanaan kegiatan Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
   d. Mengadakan evaluasi program kegiatan Bidang Integrasi Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
   e. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif, organisasi politik serta instansi dan atau lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan sistem politik;

f. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar umat beragama.

3. **Bidang Integrasi Bangsa** :

Membawahi Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Kerukunan dan Pembauran yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Integrasi Bangsa. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya,Bidang Integrasi Bangsamenyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang integrasi bangsa;
b. pelaksanaan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan bangsa, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kerukunan dan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
c. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan ketahanan bangsa, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara di bidang kerukunan dan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait ;
d. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator, sosialisasi, pengembangan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara di bidang kerukunan dan pembauran bangsa ;
e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, kerukunan dan pembauran bangsa serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

4. **Bidang Kewaspadaan** :

Membawahi Sub Bidang Pencegahan Konflik dan Sub Bidang Penanganan Konflik dan Hak Asasi Manusia membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kawaspadaan. Dengan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program pencegahan dan penanganan konflik serta Hak Asasi Manusia;
b. pelaksanaan pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sertan Hak Asasi Manusia dengan instansi dan atau lembaga terkait;
c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan LSM asing;
d. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pencegahan dan penanganan konflik serta Hak Asasi Manusia;
b. pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dilengkapi prosedur-prosedur yang diwujudkan dalam bentuk Standar Operasional prosedur (SOP) yang menjadi acuan guna penjaminan atas kelancaran tugas dan pertanggung jawaban terhadap proses dan hasil yang dilaksanakan.

Beberapa Standar Operasioanal Prosedure (S.O.P) yang dimiliki antara lain SOP mengenai Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), SOP mengenai pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan SOP Mengenai Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas maupun LSM yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo.

2.2 SUMBER DAYA PD

A. SUSUNAN DAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Adapun di dalam Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, saat ini memiliki sejumlah 38 orang personil (data per Januari tahun 2021) yang menjalankan tugasnya sebagai penggerak roda aktifitas organisasi yang terdiri dari :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Situbondo

NO	Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	17	5	22
2	CPNS	0	1	1
3	Honorer	8	7	15
Total				**38**

Susunan Pegawai berdasarkan :

a. Golongan :

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Bakesbangpol
Kabupaten Situbondo berdasar golongan ruang

NO	Golongan	JUMLAH	
		PNS	CPNS
1	Golongan IV	3	-
2	Golongan III	9	-
3	Golongan II	10	1
4	Golongan I	-	-
	Total	22	1

b. Eselon Jabatan :

Tabel 2.3. Jumlah Pejabat pada Badan Kesbangpol Kabupaten Situbondo

NO	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	4
	Total	9

c. Berdasar Pendidikan:

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Bakesbangpol Kabupaten Situbondo berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	6
2	Strata 1	11
3	Diploma	1
4	SMA dan Kejuruan	5
5	SMP	
6	SD	
	Total	**23**

d. Berdasarkan Diklat Struktural

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Bakesbangpol Kabupaten Situbondo berdasar diklat Struktural

Jenis Diklat	Jumlah
DIKLAT PIM Tk.IV	7
DIKLAT PIM Tk.III	1
DIKLAT PIM Tk.II	0

e. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Badan Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo yang berdiri di area seluas 800 m^2 berlokasi di Jl. PB. Sudirman Kabupaten Situbondo dan terdiri dari 1 Bangunan.

Tabel 2.6. Sarana dan Prasarana Bakesbangpol

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	Roda 4	3	Unit
2	Roda 2	19	Unit
3	Mesin Ketik	1	Buah
4	Neon Bok	1	Buah
5	Brankas	1	Buah
6	Filling Kabinet	16	Buah
7	White Board	16	Buah
8	Camera	3	Unit
9	Lemari Kayu	4	buah
10	Rak Buku	4	Unit
11	Meja Kerja	23	Buah
12	Kursi kerja	42	Buah
13	Meja Rapat	5	Buah
14	Kursi Rapat	39	Buah
15	Kursi Tamu	3	Set
16	Kursi Lipat	19	Buah
17	Meja Komputer	2	Buah
18	Horden	15	Buah
19	Instalasi Listrik	1	Buah
20	Lampu Box	1	Buah
21	Lemari Es	1	Buah
22	AC	20	Unit
23	Televisi	2	Buah
24	Stabilicer/UPS	9	Buah
25	Dispencer	4	Buah
26	Handy Cam	2	Buah
27	Komputer	17	Set
28	Note Book	7	Buah
29	Scanner	2	Buah
30	Printer	11	Buah
31	Laptop	10	Buah
32	Proyektor	2	Unit
33	Stereo Set	1	Unit
34	Monitor	2	Buah
35	Telepon	9	Buah
36	Radio HT	8	Buah
37	Faximile	2	Buah
38	Parabola	2	Buah

2.3 KINERJA PELAYANAN PD

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengemban tugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan, politik, dan isu-isu yang tumbuh kembang dalam cara pandang dan pemikiran masyarakat secara umum.

2.3.1. Kinerja

Guna pencapaian tingkat kinerja yang dipandang masyarakat sebagai hal yang memuaskan dan kenyamanan serta memberikan hal yang dianggap mampu menjadi acuan masyarakat maka Badan Kesbangpol Kabupaten Situbondo menyikapinya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan, pembinaan dan pemberdayaan, evaluasi, sosialisasi, penyuluhan dan bintek yang ditujukan langsung kepada masyarakat guna pencapaian kinerja yang optimal. Penilaian masyarakat mengenai kriteria kepuasan dan kepastian terhadap profesionalisme dan akuntabilitas, ditunjukkan melalui pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap masyarakat.

2.3.2. Anggaran

Sebagai pendukung kegiatan dalam mencapai kinerja yang dipandang masyarakat sebagai hal yang memuaskan maka Badan Kesbangpol Kabupaten Situbondo menyikapinya dengan alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang berbasis pada pencapaian yang ditujukan langsung kepada masyarakat guna pencapaian kinerja yang optimal.

Tabel T-C. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Situbondo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1	Jumlah Pembinaan Terhadap Parpol				9	9	9	8	8	9	9	9	8	8	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah pendataan terhadap Ormas / LSM				191	209	220	228	237	191	209	220	228	237	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase partisipasi politik masyarakat				70%	75%	80%	82%	88%	70%	75%	67%	81,85%	76,73%	100%	100%	83,75%	99,81%	87,19%
4	Prosentase rekomendasi ijin penelitian yang diterbitkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah pemetaan potensi kerawanan konflik di daerah				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
6	Prosentase Konflik sosial yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah rencana aksi yang sudah dilaksanakan oleh FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)				11	11	10	11	7	11	11	10	11	7	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
8	Jumlah rencana aksi yang sudah dilaksanakan oleh FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)				13	13	13	13	10	13	13	13	13	10	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah sosialisasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat				1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel T-C. 2.4
Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Situbondo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15	-16	-17	-18	-20	-21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.941.090	570.368.200	551.208.400	621.189.000	599.154.800	449.549.277	490.583.3 48	521.309.389	586.435.484	557.145.405	89,74 %	86,01 %	94,58 %	94,41 %	92,99 %	5%	6%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	363.079.000	362.730.000	351.450.000	235.000.000	472.224.040	350.432.600	350.358.6 00	311.322.650	227.094.025	448.185.083	96,52 %	96,59 %	88,58 %	96,64 %	94,91 %	7%	6%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	47.300.000	67.602.600	34.100.000	56.560.000	56.101.890	40.041.200	57.581.4 0 0	27.540.000	49.608.600	54.168.300	84,65 %	85,18 %	80,76 %	87,71 %	96,55	4%	8%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15	-16	-17	-18	-20	-21
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	713.231.000	744.077.050	725.350.000	550.000.000	308.650.000	651.011.000	725.909.0 50	687.089.000	477.204.000	299.010.000	91,28%	97,56%	94,73%	86,76%	96,88%	-19%	-18%
Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengembangan Etika Politik	317.027.000	508.800.000	1.721.010.500	694.608.800	655.249.500	281.275.000	494.158.5 00	1.694.125.500	690.218.800	651.962.050	88,72%	97,12%	98,44%	99,37%	99,50%	20%	23%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Kerukunan dan Pembauran	160.417.000	135.786.000	133.800.000	105.000.000	190.370.000	146.898.000	135.786.0 00	126.651.000	104.684.700	188.820.000	91,57%	100,00%	94,66%	99,70%	99,19%	4%	6%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo menghadapai beberapa tantangan dan mendapatkan beberapa peluang yang harus di lihat sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian target dan sasaran pembangunan Kabupaten Situbondo. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut;

A. Peluang (Opportunity)

a. Peningkatan SDM melalui diklat, workshop, seminar, dll.
b. Pendataan dan pendaftaran Ormas/LSM melalui aplikasi Siormas (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan).
c. Pemberian rekomendasi ijin penelitian melalui aplikasi Sriti (Sistem Rekoemndasi Ijin Penelitian).
d. Adanya kerjasama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok perempuan dan pemuda.
e. Peningkatan jaringan informasi melalui deteksi dini cegah dini terhadap tatanan kehidupan yang aman dan kondusif.

B. Ancaman (Threat)

a. Belum optimalnya regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah;
b. banyaknya Ormas yang masih belum melaporkan ke Bakesbangpol;
c. Kurangnya pembinaan dan Pengawasan terhadap Ormas/LSM;
d. Terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
e. Munculnya isu radikalisme, aliran sesat, yang bisa memicu stabilitas keamanan di Daerah ;
f. Melemahnya rasa nasionalisme
g. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu kiranya bagi Bakesbangpol melakukan pendekatan pada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan, identifikasi permasalahan dan melakukan analisa terhadap segala sesuatu yang menjadi perhatian dalam kehidupan bermasyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Ancaman Gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) terhadap Keutuhan NKRI yang semakin komplek baik dari alam maupun luar. Sedangkan kendala-kendala lain yang dihadapi dalam pelayanan OPD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik sebagai pendukung dan penghambat antara lain:

1. Faktor Penghambat

1. Sistem dan prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang belum tertata;
2. Pemahaman dan kesadaran masyarakat menggunakan hak berpolitik masih rendah;
3. Pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta menjaga keutuhan NKRI dirasa kurang;
4. Belum tervaliditas data mengenai keberadaan dan kegiatan Ormas/LSM;
5. Kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda belum optimal;
6. Sarana dan prasarana yang mendukung operasional dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan dalam masyarakat masih kurang.
7. Perencanaan dan penganggaran belum responsif gender dan inklusif.

2. Faktor Pendukung

a. Komitmen para personil pada Bakesbangpol untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab;
b. Dukungan dari Instansi lain dalam melakukan kordinasi guna penjagaan stabilitas kondisi.
c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mencukupi.
d. Kebijakan pemangku kepentingan dan dukungan terhadap pencapaian tujuan.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Permasalahan / Isu yang mendasari	Prioritas Pembangunan	Usulan kegiatan Prioritas	Sub kegiatan nomenklatur (SIPD)
1 2 3 4	Ancaman Gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) terhadap Keutuhan NKRI yang semakin komplek baik dari alam maupun luar Banyaknya aliran kepercayaan yang dapat memicu timbulnya konflik keagamaan Mudah diakses berita/informasi yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama Belum terbentuknya FKUB di tingkat Kecamatan dan Desa.	Penguatan Sistem Perijinan dan Investasi	Perumusan kebijakan tehnis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya.	Pelaksanaan Koordinasi dibidang ketahanan , ekonomi, sosiall, budaya dan fasilitasi pencegahan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahann Ekonomi, Sosial , Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghaya Kepercayaan di daerah
1 2 3	Memudarnya rasa nasionalisme (cinta Tanah Air dan Bangsa) Masyarakat Khususnya dikalangan Generasi Muda. Mudah diaksesnya berita/informasi yang dapat memecah keutuhan NKRI Adanya perasaan bangga dikalangan masyarakat khususnya generasi muda apabila melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Tehnis di bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran , Kebangsaan, Bnneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaaan Pembauran , Kebangsaan, Bnneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

No	Permasalahan / Isu yang mendasari	Prioritas Pembangunan	Usulan kegiatan Prioritas	Sub kegiatan nomenklatur (SIPD)
1	Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		Perumusan Kebijakan Teknis dan Kebijakan, Pemantapan Pelaksanaan, bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2	Masih rendahnya tingkat pemahaman Aparatur dan masyarakat tentang pentingnya kondusifitas di daerah dalam menunjang pembangunan nasional		Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewasapadaan Nasional dan Penanganan konflik sosia	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evalusi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

No	Permasalahan / Isu yang mendasari	Prioritas Pembangunan	Usulan kegiatan Prioritas	Sub kegiatan nomenklatur (SIPD)
				Pelaksanaaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
1	Pemahaman tentang Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Kelompok Perempuan, Kaum Disabilitas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda belum Maksimal		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2	Kinerja ORMAS / LSM masih perlu ditingkatkan untuk Menopang Pembangunan di Situbondo Berjaya		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

No	Permasalahan / Isu yang mendasari	Prioritas Pembangunan	Usulan kegiatan Prioritas	Sub kegiatan nomenklatur (SIPD)
			Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi dan Misi

Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana yang menjadi acuan dalam penyusunan pada RPJMD Tahun 2021 - 2026, tentunya akan menuntut perhatian lebih untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum terselesaikan dan untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Untuk itu segala program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan direncanakan oleh Bakesbangpol mengacu pada visi misi pemerintahan Kabupaten Situbondo yang merupakan suatu gambaran keadaan pembangunan jangka panjang.

Visi

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di KabupatenSitubondo, maka dibentuklah suatu Visi Kabupaten Situbondo yang hendak dicapai pada tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berahlak, Sejahtera, adil, dan Berdaya.”

Dimana visi tersebut merupakan terjemahan dari akar budaya kehidupan masyarakat Kabupaten Situbondo yang senantiasa melaksanakan kehidupan yang penuh dengan nuansa agamis dalam mewujudkan kemakmuran, berkeadilan dan kesejahteraan secara merata.

Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 tersebut, maka disusunlah misi pembangunan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. **Membangun Masyarakat Situbondo Yang Beriman Dalam Keberagaman;**
   - meningkatkan Sarana-Prasarana Tempat ibadah, pesantren dan kesejahteran guru ngaji.
   - Penanganan PMKS, Peningkatan bantuan Sosial dan Menjadikan kabupaten Layak anak, difable dan Lansia..
2. **Membangun Masyarakata Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan ;**
   - Pemerataan Akses dan Pemenuhan Standar Layanan dan Tenaga Pendidikan Umum dan Diniyah

- Memperluas Layanan Kesehatan dan Kualitas fasilitas Kesehatan (Situbondo Sehat Gratis = SEHAT)
- Ketahanan Ekonomi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan anak.

3. **Membangun Pemeritahan Yang Profesional, bersih dan Tangguh;**

- Tranformasi birokrasi dan manajemen pemerintah berbasis digital
- Meningkatkan inovasi layanan publik terintegrasi dengan data kependudukan.

4. **Membangun Infrastruktur, Ekonomi Kreatif dengan Situbondo Berkeadilan dan Berdaya Saing;**

- Pengembangan Produk Unggulan, ekonomi Kreatif dengan Situbondo "nyara investasi" untuk meyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD
- Afirmasi Kepada Petani dan nelayan dengan pembinaan fasilitasi, pendampingan dan Asuransi
- Meningkatkan Aksesibilitas infrastruktur ekonomi, pertanian dan pariwisata
- Infrastruktur Dasar rumah layak huni, sanitasi layak dan ketersediaan air bersih
- Sarana dan Prasarana daya dukung lingkungan

Misi pembangunan Kabupaten Situbondo diatas sangat berkaitan dengan Isu-Isu Strategis Kabupaten Situbondo. Dalam penetapan Misi Pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan Visi Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan Isu-Isu Strategis di Kabupaten Situbondo.

3.2.2 Program PD

Merujuk pada tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka pelaksanaan dan pencapaian pada misi kesatu "**Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman Dalam Keberagaman"** yang menjadi penunjang pada Bakesbangpol demi mewujudkan Toleransi Sosial Masyarakat, Berdasarkan RPJMD 2021-2026 maka indikator kinerja yang menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan guna pencapaian target pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;

5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Kesatuan Bangsa dan Politik Kab/Kota di Jatim.

Sebagaimana Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah **"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".** Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri merumuskan Misi yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Tujuan, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah

4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Matriks Pembanding/Komparasi Antara Sasaran Renstra PD Kabupaten, Renstra PD Propinsi Dan Renstra K/L yaitu :

Tabel 3.3

Matriks Pembanding antara sasaran Renstra PD Kabupaten dan Sasaran Renstra PD Provinsi

SASARAN RENSTRA PD KABUPATEN	SASARAN RENSTRA PD PROPINSI
1. Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Situbondo 2. Meningkatnya Ormas di Kabupaten Situbondo yang Berkualitas 3. Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama Masyarakat Kabupaten Situbondo	1. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat di Jawa Timur. 2. Menguatnya kualitas infrastruktur politik Jawa Timur. 3. Meningkatnya akutabilitas kinerja Perangkat Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada sub bab ini akan di kemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tata Ruang Wilayah

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Ancaman Gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) terhadap Keutuhan NKRI yang semakin komplek baik dari alam maupun luar 2.Banyaknya aliran kepercayaan yang dapat memicu timbulnya konflik keagamaan 3.Mudah diakses berita/informasi yang	Minimnya anggaran yang menyebabkan sosialisasi tidak secara menyeluruh terhadap masyarakat yang ada di kecamatan ataupun di desa	1. Adanya regulasi tentang rekomendasi penelitian dan PKL, SKT dan LSM 2. Adanya anggaran 3. Adanya sarana dan prasarana

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
		dapat memecah belah kerukunan umat beragama 4.Belum terbentuknya FKUB di tingkat Kecamatan dan Desa. 5. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		
2.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pemahaman tentang Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Kelompok Perempuan, Kaum Disabilitas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda belum Maksimal		
3.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Masih rendahnya tingkat pemahaman Aparatur dan masyarakat tentang pentingnya kondusifitas di daerah dalam menunjang pembangunan nasional		
4.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Memudarnya rasa nasionalisme (cinta Tanah Air dan Bangsa) Masyarakat Khususnya dikalangan Generasi Muda. 2. Mudah diaksesnya berita/informasi yang dapat memecah belah keutuhan NKRI 3. Adanya perasaan bangga dikalangan masyarakat khususnya generasi muda apabila melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan		
5.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kinerja ORMAS / LSM masih perlu ditingkatkan untuk Menopang Pembangunan di Situbondo Berjaya	Kurangnya Kontribusi Ormas dalam Pembangunan	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibangun diatas kemajemukan sehingga memiliki potensi yang tinggi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain itu masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain, yang saling terkait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum. Hal ini merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Situbondo, dapat dikemukakan beberapa isu – isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo, yaitu :

1. Belum optimalnya regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Banyaknya Ormas/LSM yang belum melaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas/LSM
4. Terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban umum
5. Munculnya isu raadikalisme, aliran sesat yang bisa memicu stabilitas keamanan di daerah
6. Melemahnya rasa nasionalisme
7. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda
8. Berkembangnya hoax (berita bohong).
9. Pengawasan orang asing, tenaga kerja asing, ormas dan NGO asing.
10. Peningkatan partisipasi politik.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi dan Misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo merupakan penjabaran dari Visi Bupati Tahun 2021 – 2026. Adapun Visi Kabupaten Situbondo tersebut adalah **"Mewujudkan Masyarakat Situbondo Berahlak, Sejahtera, adil, dan Berdaya."**

Sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo di dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap harmonisasi, pengembangan pemikiran, dan keadilan serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat melalui pelaksanaan terhadap tugas dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam beberapa misi yang ingin dicapai. Adapun misi Bupati yang diamanatkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dalam mencapai visi tersebut adalah melalui misi ke 1 (ke Satu) yatu **"Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman Dalam Keberagaman"** yang memiliki tujuan **"Mewujudkan Stabilitas dan Toleransi Sosial Masyarakat"** Sehingga mampu mencapai sasaran yaitu :

1. Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Situbondo
2. Meningkatnya Ormas di Kabupaten Situbondo yang Berkualitas
3. Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama Masyarakat Kabupaten Situbondo

yang dicanangkan oleh Bupati Situbondo dalam kurun waktu pemerintahan lima tahun mendatang.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan visi dan misi Bupati tersebut melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi pelayanan demi menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.
2. Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
5. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
6 Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

POHON KINERJA

Nama OPD: **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Sasaran RPJMD yang diampu	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI MASYARAKAT			MENINGKATNYA TOLERANSI SOSIAL	
Indikator sasaran RPJMD	INDEKS STABILITAS			INDEKS TOLERANSI	
Tujuan OPD	MEWUJUDKAN STABILITAS DAN TOLERANSI SOSIAL MASYARAKAT				
Indikator Tujuan OPD	INDEKS KEWASPADAAN DINI			INDEKS TOLERANSI	
Sasaran OPD	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Situbondo			Meningkatnya Ormas di Kabupaten Situbondo yang Berkualitas	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama Masyarakat Kabupaten Situbondo
Indikator Sasaran OPD	Indeks Kewaspadaan Dini			Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Program Prioritas OPD	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan						Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -						Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Mewujudkan Stabilitas dan Toleransi Sosial Masyarakat	Indeks Kewaspadaan Dini	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Situbondo	Indeks Kewaspadaan Dini.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU
		Indeks Toleransi	75, 89 %	77 %	78 %	79,93 %	90 %	90,50 %	Meningkatnya Ormas di Kabupaten Situbondo yang Berkualitas	Indeks Kinerja ormas.	60%	65%	70%	75%	80%	85%	
									Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama Masyarakat Kabupaten Situbondo	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,89%	77%	78%	79,93%	90%	90,50%	
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 (AA)	90, 5 (AA	91(AA)	91,5 (AA)	92(AA)	92,5(AA)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 (AA)	90,5 (AA	91(AA)	91,5 (AA)	92(AA)	92,5(AA)	Non IKU

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
2. Pembangunan karakter bangsa yang diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara.
3. Pembauran kebangsaan direfleksikan dalam bentuk cinta tanah air, antara lain: harus mengenal, memahami, mencintai wilayah, menjaga lingkungan sekitar ataupun daerah lainnya.
4. Meningkatkan kerjasama antara lembaga / instansi pemerintah, Kabupaten / Kota, lembaga intelijen dan jaringan masyarakat dalam pelaporan kejadian Ipoleksosbudhankam di daerah.
5. Meningkatkan sinergitas, kegiatan serta pelaporan aksi terpadu pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui aplikasi teknologi informasi.
6. Meningkatkan solidaritas dan pengkajian aparat intelijen, lembaga / instansi dan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan.

7. Memberikan penghargaan bagi lembaga / instansi / masyarakat yang aktif melakukan kegiatan pencegahan serta memberikan sanksi bagi lembaga / instansi yang tidak mendukung kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
8. Melakukan pendataan, pemantauan lapangan dan verifikasi data orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah Kabupaten Situbondo.
9. Melakukan pendataan, pemetaan dan melibatkan elemen pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkembangan dan aksi radikalisme / terorisme.
10. Memberikan sosialisasi kepada ormas terkait aturan - aturan mengenai penataan dan pemberdayaan ormas.
11. Pengembangan Demokratisasi dan Partisipasi Politik bagi Supra dan infrastruktur Politik.
12. Penguatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Situbondo.
13. Peningkatan SDM bagi seluruh elemen masyarakat dan lembaga terkait dalam pemahaman Budaya Politik, Etika Politik dan Hak Asasi Manusia.
14. Pemberdayaan masyarakat dalam keikutsertaan dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak.

5.2 Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis.
2. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan.
3. Membentuk SDM bangsa yang mampu mengaktualisasikan bentuk – bentuk kongkrit bela negara sesuai dengan tantangan zaman.
4. Melakukan Penguatan pembauran kebangsaan sampai ditingkat desa atau kelurahan.

5. Membentuk sistem pelaporan terpadu melalui aplikasi Teknologi Informasi serta penguatan Jaringan Intelijen.
6. Membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
7. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
8. Meningkatkan fasilitasi kegiatan melalui optimalisasi Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
9. Terdatanya dan terlaporkannya keberadaan orang asing yang menyalahgunaan ketentuan perundang undangan melalui optimalisasi Tim Pemantauan Orang Asing.
10. Meningkatkan pemahaman masyarakat, mahasiswa dan pelajar terhadap wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama, serta 4 konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
11. Membentuk tim terpadu pengawasan ormas berdasarkan Permendagri 56 / 2017.
12. Melakukan Sosialisasi pendaftaran ormas berdasarkan permendagri 57/2017.
13. Meningkatkan peran dan pemberdayaan infrastruktur politik.
14. Melaksanakan sosialisasi terkait partisipasi politik masyarakat.
15. Penguatan kelembagaan dan implementasi peraturan perundang-undangan dalam peningkatan pemahaman tentang budaya politik melalui pemberdayaan masyarakat.
16. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam Peningkatan pemahaman budaya, etika politik

Untuk lebih jelas memahami tujuan, sasaran, dan strategi, arah kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siubondo pada Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Situbondo Berahlak, sejahtera, Adil. Dan Berjaya			
Misi : Membangun Masyarakat Situbondo Beriman Dalam Keberagaman			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Terwujudnya Kesadaran Masyarakat, Lembaga Ormas dan Parpol dalam mendukung ketentraman dan ketertiban di daerah	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis
			Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan.
		Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengaktualisasikan bela negara sesuai dengan tantangan zaman

			Melakukan Penguatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku dan umat beragama
			Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama, serta 4 konsensus kebangsaan
		Memelihara kewaspadaan daerah agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui Peningkatkan sinergitas dan kerjasama antara lembaga / instansi pemerintah, Kabupaten, lembaga intelijen dan jaringan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan	Membentuk sistem pelaporan terpadu melalui Teknologi Informasi serta penguatan Jaringan Intelijen
			Membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
			Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
			Meningkatkan fasilitasi kegiatan melalui optimalisasi Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
			Terlaporkannya keberadaan orang asing yang menyalahgunaan ketentuan perundang undangan melalui optimalisasi Tim Pemantauan Orang Asing
		Meningkatkan pemberdayaan dan penataan ormas	Membentuk tim terpadu pengawasan ormas berdasarkan Permendagri 56 / 2017
			Melakukan Sosialisasi permendagri 57/2017 tentang pendaftaran ormas
		Pengembangan Demokratisasi dan Partisipasi Politik bagi Supra dan infrastruktur Politik	Meningkatkan peran dan pemberdayaan infrastruktur politik
			Penguatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Kab. Situbondo
		Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat,	dan implementasi peraturan perundang-undangan dalam peningkatan pemahaman tentang budaya politik

		berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan	
			Penguatan kelembagaan dan optimalisasi peran serta stakeholder dalam Peningkatan pemahaman budaya, etika politik

Tabel 5.2
Matriks Analisis SWOT

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Oportunity)	Tantangan (Threats)
Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo, yakni: 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;	1. Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Masa (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan maupun Partai Politik	1. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama
	2. Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan	2. Tekad Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan "*Good Governance*" dan "*Clean Governance*" serta memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak	2. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara
	3. Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo		3. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparatur Pemerintah

Tabel. 5.3

RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
Mewujudkan Toleransi Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi	Total Nilai Persepsi x nilai penimbang / Total pertanyaan yg terisi	Terwujudnya Kewaspadaan DiniMasyarakat,	Indeks Kewaspadaan Dini.	Jml Potensi Konflik yg ditangani / Jml potensi konflik x 100%	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi politik Masyarakat dalam Berdemokrasi.	Jml pemilih yg sah / DPT x 100%
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	Jml Masyarakat yg dibina / Jml Masyarakat X 100%
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase konflik sosial yang di selesaikan	Jml Konflik yg ditangani / Jml potensi konflik x 100%
			Meningkatnya Ormas di Kabupaten Situbondo yang Berkualitas	Indeks Kinerja Ormas.	Jml Ormas berkinerja baik / Jml Ormas x 100%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase organisasi kemasyarakatan yang berkinerja baik	Jml Ormas yang aktif / Jml Ormas x 100%
			Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama Masyarakat Kabupaten Situbondo	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Total Nilai Persepsi x nilai penimbang / Total pertanyaan yg terisi	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase peningkatan dan penguatan Idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jml masyarakat yg di bina / Jml Masyarakat X 100%

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
III	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Mewujudkan Stabilitas dan Toleransi Sosial	Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	85,61 (A)	90 (AA)	4.064.574.462	90,5 (AA)	3.626.906.705	91 (AA)	3.650.536.733	91,5 (AA)	3.674.166.760	92 (AA)	3.697.796.787	92,5 (AA)	3.721.426.813	92,5 (AA)	22.435.408.260	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Masyarakat		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun	10 Laporan	10 Laporan	73.000.000	10 Laporan	71.000.000	10 Laporan	71.000.000	10 Laporan	71.000.000	10 Laporan	71.000.000	10 Laporan	73.000.000	60 Laporan	430.000.000	Bakesbangpol	SITUBONDO
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat adaerah yang terbayar	19 orang	48 orang, 5 laporan	3.468.731.942	48 orang, 5 laporan	3.038.064.185	48 orang, 5 laporan	3.055.998.427	48 orang, 5 laporan	3.080.324.240	48 orang, 5 laporan	3.103.258.481	48 orang, 5 laporan	3.125.584.293	288 orang, 30 laporan	18.871.961.568	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Batik dan Pakaian Lapangan yang dibelanjakan	37 steel	41 steel	5.420.250	82 steel	5.420.250	82 steel	6.116.036	41 steel	5.420.250	41 steel	6.116.036	41 steel	5.420.250	246 steel	33.913.072	Bakesbangpol	SITUBONDO
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang di sediakan	17 unit, 24 rapat, 35 jenis	17 unit, 24 rapat, 35 jenis	129.392.745	17 unit, 24 rapat, 35 jenis	124.392.745	17 unit, 24 rapat, 35 jenis	129.392.745	17 unit, 24 rapat, 35 jenis	129.392.745	17 unit, 24 rapat, 35 jenis	129.392.745	17 unit, 24 rapat, 35 jenis	129.392.745	102 unit, 144 rapat, 210 jenis	771.356.470	Bakesbangpol	SITUBONDO
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang peralatan Kantor yang dibeli	2 jenis	2 jenis	19.853.350	3 jenis	19.853.350	2 jenis	19.853.350	3 jenis	19.853.350	2 jenis	19.853.350	2 jenis	19.853.350	12 jenis	119.120.100	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan	14 orang, 48 rek, 3000 surat	14 orang, 48 rek, 3000 surat	225.016.575	14 orang, 48 rek, 3000 surat	225.016.575	14 orang, 48 rek, 3000 surat	225.016.575	14 orang, 48 rek, 3000 surat	225.016.575	14 orang, 48 rek, 3000 surat	225.016.575	14 orang, 48 rek, 3000 surat	225.016.575	84 orang, 288 rek, 18000 surat	1.350.099.450	Bakesbangpol	SITUBONDO
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	22 unit, 22 stnk, 17 jenis, 1 gedung	22 unit, 22 stnk, 17 jenis, 1 gedung	143.159.600	22 unit, 22 stnk, 17 jenis, 1 gedung	143.159.600	22 unit, 22 stnk, 17 jenis, 1 gedung	143.159.600	22 unit, 22 stnk, 17 jenis, 1 gedung	143.159.600	22 unit, 22 stnk, 17 jenis, 1 gedung	143.159.600	22 unit, 22 stnk, 17 jenis, 1 gedung	143.159.600	132 unit, 132 stnk, 102 jenis, 6 gedung	858.957.600	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama Masyarakat Kabupaten Situbondo	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase peningkatan dan penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00%	100,00%	554.889.200	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	292.500.000	100,00%	300.000.000	100,00%	307.500.000	100,00%	2.054.889.200	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	147 orang	1000 orang	554.889.200	1000 orang	300.000.000	1000 orang	300.000.000	2000 orang	292.500.000	1000 orang	300.000.000	1000 orang	307.500.000	7000 orang	2.054.889.200	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Situbondo	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi politik Masyarakat dalam Berdemokrasi.	76,73%	76,73%	1.294.516.950	77,50%	1.112.189.230	77,00%	1.217.623.398	78,50%	1.233.359.345	79,00%	1.108.375.030	79,50%	1.124.983.995	79,50%	7.091.047.948	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	864 orang	2000 orang	1.294.516.950	2000 orang	1.112.189.230	2000 orang	1.217.623.398	4000 orang	1.233.359.345	2000 orang	1.108.375.030	2000 orang	1.124.983.995	12000 orang	7.091.047.948	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
	Meningkatnya Ormas di Kabupaten Situbondo yang Berkualitas	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase organisasi kemasyarakatan yang berkinerja baik	60%	60%	200.179.550	65%	650.000.000	70%	700.000.000	75%	700.000.000	80%	712.487.775	85%	825.000.000	85%	3.787.667.325	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	730 orang	1500 orang	200.179.550	1500 orang	650.000.000	1500 orang	700.000.000	2000 orang	700.000.000	1500 orang	712.487.775	1500 orang	825.000.000	8000 orang	3.787.667.325	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Situbondo	**8.01.05**	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya**	**-**	**100 %**	**204.889.000**	**100 %**	**240.000.000**	**100 %**	**340.000.000**	**100%**	**313.715.059**	**100 %**	**240.000.000**	**100 %**	**206.280.920**	**100 %**	**1.544.884.979**	Bakesbangpol	SITUBONDO
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	-	500 orang	204.889.000	900 orang	240.000.000	1000 orang	340.000.000	1000 orang	313.715.059	850 orang	240.000.000	1000 orang	206.280.920	4250 orang	1.544.884.979	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Situbondo	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase konflik sosial yang di selesaikan	100%	100 %	225.000.000	100 %	250.000.000	100 %	283.963.192	100%	295.000.000	100 %	400.000.000	100 %	355.000.000	100 %	1.808.963.192	Bakesbangpol	SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	838 orang	1500 orang	225.000.000	1500 orang	250.000.000	1500 orang	283.963.192	2000 orang	295.000.000	1500 orang	400.000.000	1500 orang	355.000.000	9500 orang	1.808.963.192	Bakesbangpol	SITUBONDO
							6.544.049.162		**6.179.095.935**		**6.492.123.322,65**		**6.508.741.164,11**		**6.458.659.591,86**		**6.540.191.728**		**38.722.860.903,51**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*, karena indikator kinerja memiliki alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan kata lain fungsi dari indikator kinerja adalah menjelaskan informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas dengan menggunakan ukuran secara kuantitatif yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan suatu organisasi dalam pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Secara sederhana Indikator Kinerja akan menjadi tolak ukur evaluasi dan Indikator Kinerja Kunci yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

7.1. Indikator Kinerja

Digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil serta proses pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang, maka indikatorlah yang menjadi ukuran dalam menentukan tujuan pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana visi dan misi Bupati Situbondo telah tercapai. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis, dan sebagai bahan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan setiap kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

7.1.1. Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur menggunakan parameter akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sehingga Sistem Renstra dengan LAKIP-nya menjadi satu kesatuan dan dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri atas :

- Subsistem perencanaan.
- Subsistem Perjanjian Kinerja
- Subsistem Pengukuran Kinerja
- Subsistem Pengelolaan Data Kinerja
- Subsistem Pelaporan Kinerja
- Subsistem Reviu dan Evaluasi Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja, dijelaskan melalui penetapan indicator kinerja yang merupakan proses identifikasi dan klarifikasi terhadap unsur-unsur peyelenggaraan pemerintahan yang memiliki nilai secara kuantitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja pada sasaran serta tujuan melalui kegiatan, program dan kebijakan yang akan dan telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo. Penetapan indikator kinerja ini perlu disepakati bersama Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo, karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD Kabupaten Situbondo dalam menilai kinerja tahunan dan akhir masa jabatan Bupati Situbondo. Indikator kinerja terdiri dari lima (5) tolok ukur :

1. **Masukan (inputs)**

   Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana,sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

2. **Keluaran (outputs)**

   Merupakan hasil yang diharapkan langsung dapatdicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

3. **Hasil (out comes)**

   Adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

4. **Manfaat (benefit)**

   Merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan manfaat dari indicator hasil. Manfaat tersebut baru terlihat atau diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

5. **Dampak (Impacts)**

   Adalah memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. indikator dampak pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impacts ini menunjukan dasar pemikiran dilaksanakan kegiatan yang menggambarkan aspek mikro pelaksanaan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kewaspadaan Dini.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Kinerja ormas.	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	86%
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,89%	75,89%	77%	78%	79,93%	80%	80,50%	81%

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Situbondo.

Dimana pelaksanaan dari perencanaan diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo, sebagai bagian dari tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah Kabupaten Situbondo.

Situbondo, 20 September 2021

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO

BASUKI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19620216 199203 1 004